

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

Jalan Salak No. 67 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Salak No. 67 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telephon (0351) 473929 fax (0351) 485081
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN
NOMOR : 050/ 41 / 401.107/2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Bidang / Kepala Sub Bagian / Sub Koordinator agar menjadikan Renja Perubahan ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 18 Agustus 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN



ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197205101992011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) Dinas Perdagangan serta sebagai dasar penyusunan kebijakan dan tolok ukur kegiatan Dinas Perdagangan dalam pencapaian tujuan organisasi;

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN



ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 1992011 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu 5 Tahun. Rencana Kerja (RENJA) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada prioritas pembangunan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan nantinya juga akan dievaluasi melalui Laporan Kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditahun berikutnya. Fungsi dari Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan dibentuknya satuan kerja Dinas Perdagangan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Perdagangan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Dinas

Perdagangan, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta penelaahan kebijakan tingkat regional dan nasional dalam bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perdagangan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/-BANGDA/2008 tanggal 28 pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun ;
18. Keputusan Walikota Madiun Nomor 060-401.021/332/2021 Tentang Rincian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perdagangan Kota Madiun

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 yang telah dilaksanakan, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan serta sebagai dasar penyusunan kebijakan dan tolok ukur kegiatan Dinas Perdagangan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

1.3.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Tahun 2023 adalah menjabarkan rencana program serta menetapkan target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran ;
- b) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
- c) Untuk menjamin keterkaitan & konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pengawasan pada setiap tahun anggaran ;

- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan ;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perdagangan

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perdagangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Kerja Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023
- 3.2. Rencana Kerja Perubahan Program Dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2023
- 3.3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Madiun sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sbb:

a. Realisasi Pencapaian Program/ Kegiatan (Urusan Wajib/pilihan) Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan II

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN			
		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	894.000	0	67%	67%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	894.000	0	4 dokumen	67%
	b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.353.202.622	3.852.821.613	50%	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.353.202.622	3.852.821.613	75 orang/bulan	50%
	c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.544.700	0	0%	0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	61.544.700	0	-	0%
	d) Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.443.200	128.688.800	93%	93%

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.443.200	128.688.800	28 laporan	93%
	e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.500.000	5.500.000	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.500.000	5.500.000	1 paket	100%
	f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.400.792	338.384.200	50%	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	842.400.792	338.384.200	2 laporan	50%
	g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.691.114	175.793.459	73%	73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.701.714	109.619.659	23 unit	52%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.336.000	45.307.200	3 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.653.400	20.866.600	2 unit	67%

2) Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	264.204.400	87.276.500	75%	75%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	264.204.400	87.276.500	56 dokumen	75%
3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	713.682.428	305.830.850	17 pasar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	11.046.000	9.068.000	3 unit	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	702.636.428	296.222.850	17 unit	100%
	b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.608.567.200	1.452.430.600	75%	75%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	210.310.000	106.400.000	2 dokumen	100%

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.398.257.200	1.346.030.600	2 dokumen	50%
4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	a) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	236.664.000	90.869.000	45,5%	45,5%
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100.707.000	51.466.000	2 laporan	67%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	135.957.000	39.403.000	2 laporan	50%
	b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	17.993.000	9.978.000	50%	50%
	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.993.000	9.978.000	1 laporan	50%
	5) Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	214.569.024	76.978.400	6 Bulan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	205.301.024	72.528.400	3836 unit	55%

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) 2023

	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	9.268.000	4.450.000	75 orang	50%
6) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	309.031.550	13.000.000	50%	50%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	129.031.550	3.000.000	1 UMKM	25%
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	180.000.000	10.000.000	1 dokumen	50%

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 tidak ada perubahan tujuan dan sasaran Rencana Kerja. Sesuai permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Belanja tidak langsung melebur dalam belanja langsung atau Belanja Rutin Perangkat Daerah.

3.2. RENCANA KERJA PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**3.2.1 RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2023 (1 Program, 7 Kegiatan, 9 Sub Kegiatan)**

Rencana Kerja Belanja Langsung Rutin Dinas Perdagangan semula Rp. 10.923.676.428,- terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan dan 9 sub kegiatan, menjadi Rp. 10.916.553.086,- terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan dan 9 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	894.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	894.000,-
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Sebelum Perubahan	Rp.	9.353.202.622,-
Setelah Perubahan	Rp.	9.353.202.622,-

<p>1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> 	<p>Rp. Rp.</p>	<p>61.544.700,- 61.544.700,-</p>
<p>1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> 	<p>Rp. Rp.</p>	<p>276.443.200,- 291.443.200,-</p>
<p>1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> 	<p>Rp. Rp.</p>	<p>5.500.000,- 64.168.000,-</p>
<p>1.6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyedia Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> 	<p>Rp. Rp.</p>	<p>842.400.792,- 754.249.250,-</p>
<p>1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> 	<p>Rp. Rp. Rp. Rp.</p>	<p>252.701.714,- 238.701.714,- 50.336.000,- 71.696.200,-</p>

<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Sebelum Perubahan 	Rp.	80.653.400,-
	Rp.	80.653.400,-
<p style="text-align: center;"><i>Setelah Perubahan</i></p>		

3.2.2 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG USAHA PERDAGANGAN (3 Program, 4 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan)

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari 1 Program, 4 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 827.892.950,- menjadi 1 Program, 2 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 826.662.950,- dengan rincian sebagai berikut:

<p>1. ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</p> <p>1.1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	<p>Sebelum Perubahan</p> <p><i>Setelah Perubahan</i></p>	<p>Rp.</p> <p>Rp.</p>	<p>264.204.400,-</p> <p>267.374.400,-</p>
<p>2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</p> <p>2.1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 			

Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Sebelum Perubahan Setelah Perubahan	Rp.	100.707.000,-
	Rp.	96.307.000,-
<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 	Rp.	135.957.000,-
	Rp.	135.957.000,-
2.2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 	Rp.	17.993.000,-
	Rp.	17.993.000,-
3. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
3.1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 	Rp.	129.031.550,-
	Rp.	129.031.550,-
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 	Rp.	180.000.000,-
	Rp.	180.000.000,-

3.2.3 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (1 Program, 2 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan)

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat terdiri dari 1 Program, 2 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan dengan biaya sebesar Rp.4.322.249.628,- menjadi 1 Program, 2 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan dengan biaya sebesar Rp.4.323.887.270,- dengan rincian sebagai berikut:

<p>1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</p> <p>1.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> • Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> <p>1.2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> • Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> 	<p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p>	<p>11.046.000,-</p> <p>11.046.000,-</p> <p>702.636.428,-</p> <p>800.254.070,-</p> <p>210.310.000,-</p> <p>210.310.000,-</p> <p>3.398.257.200,-</p> <p>3.302.277.200,-</p>
--	---	---

3.2.4 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD METROLOGI

LEGAL (1 Program, 1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan)

Rencana Kerja Program dan Kegiatan UPTD Metrologi Legal terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 214.569.024,- menjadi 1 Program, 1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 235.684.724,- dengan rincian sebagai berikut :

<p>1. PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>1.1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> • Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal Sebelum Perubahan <i>Setelah Perubahan</i> 	<p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p>	<p>205.301.024,-</p> <p>226.416.724,-</p> <p>9.268.000,-</p> <p>9.268.000,-</p>
--	---	---

3.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 Dinas Perdagangan Kota Madiun Terdiri Dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4		5
RUTIN					
1	Meningkatkan peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 6 dokumen 100% 75 orang/ bulan 100% 1 paket 100% 30 laporan 100%

				<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 	1 unit
				<p>1.6. Penyedia Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</p>	100%
				<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyedia Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 	4 laporan
				<p>1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	100%
				<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 	44 unit
				<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	3 unit
				<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	3 unit

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4		5
BIDANG USAHA PERDAGANGAN					
1	Meningkatkan peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya volume usaha perdagangan	<p>1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</p> <p>2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</p>	<p>1.1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <p>2.1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang 	<p>100%</p> <p>75 dokumen</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>4 laporan</p>

				<p>Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</p> <p>2.2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 	<p>100%</p> <p>2 laporan</p>
			<p>3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p>	<p>3.1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota • Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 	<p>4 kali</p> <p>4 UMKM</p> <p>2 dokumen</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4		5
BIDANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT					
1	Meningkatkan peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan retribusi pasar rakyat	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan • Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan • Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 	17 pasar 3 unit 17 unit 100% 2 kali 118 orang

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4		5
UPTD METROLOGI LEGAL					
1	Meningkatkan peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya standarissi dan perlindungan konsumen	1. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen	1.1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang • Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal 	12 bulan 7000 unit 150 orang

MATRIK PERUBAHAN RENJA APBD 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Madiun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Setelah		Sebelum	Target		
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah										
3		URUSAN PEMERINTAHAN PELBIHAN																			
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														16,268,388,030	16,302,788,030		18,280,389,000		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														10,923,676,428	10,916,553,086		10,662,453,560	
3	30	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														894,000	894,000		25,609,950
3	30	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	6 dokumen	6 dokumen	18.31 Skor	18.31 Skor	894,000	894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	25,609,950
3	30	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														9,353,202,622	9,353,202,622		8,990,740,000
3	30	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	75 orang/bulan	75 orang/bulan	18.31 Skor	18.31 Skor	9,353,202,622	9,353,202,622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	8,990,740,000
3	30	01	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														61,544,700	61,544,700		176,915,450
3	30	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	1 paket	1 paket	18.31 Skor	18.31 Skor	61,544,700	61,544,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	176,915,450
3	30	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														276,443,200	291,443,200		207,059,200
3	30	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	30 laporan	30 laporan	18.31 Skor	18.31 Skor	276,443,200	291,443,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	207,059,200
3	30	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														5,500,000	64,168,000		100,000,000
3	30	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Taman	A skor	A skor	1 Unit	9 Unit	18.31 Skor	18.31 Skor	5,500,000	64,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	100,000,000
3	30	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														842,400,792	754,249,250		809,523,570
3	30	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	2 laporan	4 laporan	18.31 Skor	18.31 Skor	842,400,792	754,249,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	809,523,570
3	30	01	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														383,691,114	391,051,314		372,605,390

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Madiun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3.30.01.2.0.9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	44 unit	44 unit	18.31 Skor	18.31 Skor	252,701,714	238,701,714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	234,060,190	
3.30.01.2.0.9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	3 Unit	3 Unit	18.31 Skor	18.31 Skor	50,336,000	71,696,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	50,336,000	
3.30.01.2.0.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	3 unit	3 unit	18.31 Skor	18.31 Skor	80,653,400	80,653,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	88,209,200	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											264,204,400	267,374,400			300,772,500		
3.30.02.2.0.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan											264,204,400	267,374,400			300,772,500		
3.30.02.2.0.1.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 dokumen	75 dokumen	0.7 %	0.7 %	264,204,400	267,374,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	300,772,500	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											4,322,249,628	4,323,887,270			6,365,963,990		
3.30.03.2.0.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											713,682,428	811,300,070			2,392,878,990		
3.30.03.2.0.1.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 unit	3 unit	5 %	5 %	11,046,000	11,046,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	1,620,746,000	
3.30.03.2.0.1.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 unit	17 unit	5 %	5 %	702,636,428	800,254,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	772,132,990	
3.30.03.2.0.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											3,608,567,200	3,512,587,200			3,973,085,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Madiun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3.30.03.2.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	5 %	5 %	210,310,000	210,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	360,310,000	
3.30.03.2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	5 %	5 %	3,398,257,200	3,302,277,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	3,612,775,000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											254,657,000	250,257,000			187,300,000		
3.30.04.2.0	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											236,664,000	232,264,000			169,307,000		
3.30.04.2.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	0.7 %	0.7 %	100,707,000	96,307,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	63,307,000	
3.30.04.2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	4 Laporan	0.7 %	0.7 %	135,957,000	135,957,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	100,000,000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											17,993,000	17,993,000			17,993,000		
3.30.04.2.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	0.7 %	0.7 %	17,993,000	17,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	17,993,000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											214,569,024	235,684,724			329,724,100		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											214,569,024	235,684,724			329,724,100		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Madiun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7000 unit	7000 unit	100 %	100 %	205,301,024	226,416,724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	320,556,100	
3.30.06.1.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	100 %	100 %	9,268,000	9,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	9,168,000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											309,031,550	309,031,550			414,174,850		
3.30.07.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri											309,031,550	309,031,550			414,174,850		
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 UMKM	4 UMKM	0.7 %	0.7 %	129,031,550	129,031,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	203,874,850	
3.30.07.1.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	0.7 %	0.7 %	180,000,000	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	210,300,000	
TOTAL												16,288,388,030	16,302,788,030			18,280,389,000		

BAB IV P E N U T U P

Proses pelaksanaan demokrasi telah menempatkan masyarakat sebagai salah satu pelaku penting dalam pembangunan di berbagai bidang, sedang pemerintah lebih memiliki peran yang bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma tersebut mendorong perubahan peranan masyarakat dalam pembangunan yang bersifat partisipatif masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian ujung tombak perberdayaan perdagangan dan pengembangan pasar rakyat adalah Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan.

Pemberdayaan di Bidang Usaha Perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peranan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan memberikan dukungan perkuatan bagi IKM dan KUMKM dengan melalui stimulant program.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2023 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2019 – 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun serta target dan Sasaran yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2023 merupakan bahan dalam penyusunan usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Lalu.


Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kota Madiun.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini disusun untuk dapatnya dipergunakan sebagai jembatan penghubung dalam penentuan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan arah kebijakan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Madiun, 18 Agustus 2023

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN



ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 1992011 001